PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH (SPIP) DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)

Oleh :
Weni Nirmala Sari
Pembimbing : Vince Ratnawati dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : weninirmala@yahoo.com

The Effect of the Local Government Officials Performance, Local Financial Management, Government's Internal Control System, and Organization Commitment on the Good Governance Implementation (Empirical studies on SKPD in Rokan Hulu Regency)

ABSTRACT

This study aimed to examine (1)The effect of the local government officials performance on the good governance implementation (2) The effect of the local financial management on the good governance implementation (3) The effect of the government's internal control system on the good governance implementation and (4) The effect of the organization commitment on the good governance implementation. The sample on this study are all of SKPD in Rokan Hulu regency. Hipotesist in this study are tested using Statistical Product and Service Solution (SPSS) program ver. 20.0. This study used a primer datas obtained through questionnaires given to chief officer, chief financial officer, chief planning and programming officer, and chief public and personnel officer. From 100 sets questionnaires distributed, 93 sets questionnaires returned and due to missing data/incomplete answer so only 88 sets questionnaires were analyzed. The result of this study found that (1) the local government officials performance positively effect the good governance implementation, (2) financial management positively effect the good governance implementation, (3) the government's internal control system positively effect the good governance implementation and (4) organization commitment positively effect the good governance implementation.

Keyword: Governance, Performance, Financial, System, and Organization.

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan hubungan pemerintah dan masyarakat sejak terjadinya reformasi besar-besaran baik dibidang kelembangaan pemerintah, ekonomi, dan politik.

Maka muncullah konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut transparansi pengelolaan

keuangan rakyat sehingga terciptanya akuntabilitas publik. Tuntutan ini memang wajar, karena mengingat sebelum reformasi tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan rakyat. Hal itu terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan kontrol pejabat-pejabat yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal yang tidak bersinergi dalam mengawasi kinerja pemerintahan pusat maupun daerah.

Good Governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 2004:25). Suatu penyelenggaran negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsesnsus, keadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah atau kinerja aparatur pemerintah yang baik dan handal yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Berkaitan dengan hal tersebut maka karakteristik *good governance,* diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance.* Salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju kepemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012:251).

Bastian (2001:329) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi.Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Gusmal dalam Ruspina, 2013).

Selain kinerja, keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat juga diukur dengan pengelolaan keuangannya. Dengan pengelolaan keuangan tersebut maka dapat menentukan keberhasilan serta mendukung untuk kelancaran suatu kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Taun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaaban dan pengawasan keuangan daerah. .

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif

dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah juga memerlukan sistem pengendalian *intern* yang memadai. Sistem pengendalian intern pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Peran Sistem pengendalian *intern* pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sistem Pengendalian internal baru, ditetapkan pada tahun 2008 yakni PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI). Tujuan dari pengendalian *intern* akan tercapai jika kelima elemen pengendalian *intern* telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian *intern* yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008).

Tidak hanya kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah saja yang perlu diperhatikan, namun komitmen organisasi dalam konteks anggota organisasi. Dimana komitmen organisasi yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi (Wiratno, 2013).

Luthans (2002) mengemukakan komitmen organisasi sebagai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dari sebuah organisasi, kesediaan untuk berusaha keras demi tercapainya tujuan organisasi dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.Sedangkan menurut Robbins (2003) komitmen organisasi adalah salah satu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Kabupaten Rokan Hulu memperoleh penilaian CC atas lakip. Artinya, Kabupaten Rokan Hulu masih perlu perbaikansehingga memperoleh penilaian yang maksimal dalam akuntabilitas kinerja.(*http://www.menpan.go.id).*

Selain itu, Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa PengecualianDengan Paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2014. Artinya, masih ada sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemkab Rokan Hulu, meski cacatan tersebut dinyatakan tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemkab Rokan Hulu tahun 2014.BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian *intern* dalam penyusunan laporankeuangan, yaitu: (1) Pengendalian atas Pengelolaan Kas Daerah oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Belum Memadai dan (2) Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rokan HuluBelum Memadai.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangandalam pengelolaan keuangan daerah,

diantaranya yaitu: (1) Terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2014 Yang Terlambat Disetorkan dan Belum Disetorkan ke Kas Daerah/Negara dan (2) Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi.*(http://www.bpk.go.id)*

Ristanti (2014), meneliti tentang Pengaruh SistemPengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*. Hasil membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Sedangkan Ruspina (2013), dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *good governance* mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan negatif terhadap penerapan *good governance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ruspina (2013) dengan judulPengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *good governance*yang membedakan dalam penelitian ini adalah adanya penambahan variabel bebas yaitu Komitmen Organisasi dan lokasi penelitian yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian ini di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan belum ada ditemukan penelitian yang sama untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu serta sebagaimana telah diuraikan diatas dimana saat ini pemerintah telah menerapkan *good governance* pada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahanyang terdapat pada tubuh pemerintah daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah kinerja aparatur pemerintah berpengaruh tehadap penerapan *good governance*? 2) Apakah pengelolaan keuangan daerah perpengaruh terhadappenerapan *good governance*? 3) Apakah sistem pengendalian *intern* pemerintah perpengaruh terhadap penerapan *good governance*? 4) Apakah komitmen organisasi berpegaruh terhadap penerapan *good governance*?

Tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*. 2) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. 3) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap penerapan *good governance*. 4) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Good Governance

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance sebagai berikut "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"*. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, mengunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

UNDP dalam Mardiasmo (2004: 24) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

1. Partisipasi (*participation*)
2. Aturan Hukum *(Rule of law)*
3. Transparansi *(Transparency)*
4. Daya Tanggap *(Responsiveness)*
5. Berorientasi Konsensus *(Consensus orientation)*
6. Berkeadilan *(Equity)*
7. Efesiensi dan Efektif *(Efficiency and effectiveness*)
8. Akuntabilitas *(Accountability)*
9. Visi Strategi *(Srategic vision)*

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010:416) kinerja adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan, pertanggungjawaban manajemen dan sejenisnya. Aparatur pemerintah adalah sekumpulan manusia yng mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan dan kedudukan sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis dalam Wardani (2010). Sedangkan menurut Moerdiono dalam Ruspina, 2013), mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden Republik.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi (Sedarmayanti 2004 dalam Ruspina 2013) :

1. Indikator masukan *(input)* adalah menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri kepribadian karyawan dengan hasil (prestasi) kerjanya. Ciri atau karakteristik kepribadian yang dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan satun dan lain-lain.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator peroses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Maksudnya untuk menilai prestasi kerja karyawan melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan.
3. Indikator keluaran (*output)* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan nonfisik.

4. Indikator hasil *(outcome)* adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator manfaat *(benefit)* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak *(impact)* adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah sebagai berikut :

"keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tertentu."

Menurut Domai 2002 dalam Ruspina 2013, tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :
1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2) Perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.
3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah
5) Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Sistem Pengendalian *Inten* Pemerintah

Menurut Arens (2008:370) `sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1)efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mulyadi (1993:165) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal pemerintah tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

PP No 60 tahun 2008 menyatakan tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu :

a. lingkungan pengendalian,
b. penilaian resiko,
c. aktivitas pengendalian,
d. informasi dan

e. komunikasi dan pemantauan

Komitmen Organisasi

Robbins (2008) mendefinisikan komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana seorang anggota memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan organisasi tersebut. Komitmen artinya sebagai sikap anggota untuk setiap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Luthans (2002) mengemukakan komitmen organisasi sebagai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dari sebuah organisasi, kesediaan untuk berusaha keras demi tercapainya tujuan organisasi dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian kegiatan ataupun program dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi pemeirntah.Dengan adanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas maka akan semakin mudah untuk mewujudkan penerapan *good governance*. Oleh karena itu, jika ingin mendukung agar penerapan *good governance* tercapai maka terlebih dahulu harus meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas di suatu pemerintahan daerah.

Kinerja aparatur pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu instansi-instansi pemerintah dalam menciptakan kinerja-kinerja yang baik dan berpotensi . Jika kinerja aparatur pemerintah daerah semakin baik maka kinerja tersebut juga dapat mendukung tata pengelolaan pemerintah yang baik *(Good Governance)* hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian (Ruspina, 2013) yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Governance.* Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H_1 : diduga kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance.*

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good governance*

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Suatu instansi/organisasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan (dari tahap perencanaan hingga pelaporan) pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan

tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arso, 2012 dalam Ruspina, 2013).Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan memberikan penilaian yanng berupa sajian laporan keuangan untuk menjadi faktor kunci dalam penerapan *good governance*.

H_2 : diduga pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance.*

Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good governance*

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Habibie (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin baik pengendalian internal, maka semakin baik pula *good governance.* Hal tersebut berarti dengan adanya sistem pengendalian *intern* pemerintah maka akan terciptanya pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H_3 : diduga sistem pengendalian *intern* pemerintah kemungkinan berpengaruh terhadap penerapan *good governance.*

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Komitmen organisasi adalah kepercayaan yang kuat dan keterterimaan terhadap tujuan- tujuan dan nilai-nilai organisasi serta keinginan untuk berusaha mencapai tujuan organisasi tersebut (Porter et al. 1974; 1981; Nouri dan Parker, 1998, dalam Supriyono, 2004). Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat keterikatan perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. (George danJones, 1999 dalam Kunwaviyah, 2010).

Keberhasilan penerapan *good governance* diduga tidak dapatdicapai tanpa adanya komitmen organisasi yang kuat dalam suatu instansi pemerintah dan juga merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk membangun suatu organisasi. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Wiratno, 2010) yaitu komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance.*Berdasarkan uraian ringkas teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H_4 : diduga komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir dimana yang menjadi objek penelitian adalah SKPD Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 25 SKPD. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling*.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas di dalam SKPD, karena kepala dinas memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
2. Kepala sub bagian keuangan dan di dalam SKPD, karena mempunyai tugas menyusun pengelolaan keuangan.
3. Kepala sub bagian perencanaan dan program, karena mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan program kegiatan.
4. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, karena mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum.

Masing-masing SKPD akan diberikan 4 (empat) kuesioner yang akan diisikan oleh pihak-pihak tersebut dimasing-masing SKPD, sehingga total subjek penelitian yang akan diberikan kuesioner sebanyak 100 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data tersebut diperoleh secara langsung dari responden itu sendiri, dengan cara melakukan pengisian secara langsung dari kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan secara terstruktur, dimana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif tertentu didalam kuesioner tersebut, kemudian hasil jawaban responden atas kuesioner tersebut dikumpulkan dan diolah menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian *intern* pemerintah dan komitmen organisasi terhadap penerapan *good governance*. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Di mana:

Y = penerapan *good governance*
α = konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$ = koefisien regresi
X_1 = kinerja aparatur pemerintah daerah
X_2 =pengelolaan keuangan daerah
X_3 = sistem pengendalian *intern* pemerintah
X_4 = komitmen organisasi
e = variabel pengganggu *(error term)*

Definisi Operasional Variabel

1) Penerapan *GoodGovernance* (Y)

Variabel dependen penerapan *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikatp dan polatindak pelakunya dilandasi prinsip – prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 2004). Variabel ini diukur dengan indikator partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya anggap, berorientasi, konsesnsus, berkeadlilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

2) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X1)

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan stretegi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi aparatur tersebut (Gusmal dalam Ruspina, 2013). Variabel ini diukur dengan indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

3) Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP No.58 Tahun 2005).Jika dalam suatu instansi/dinas/badan memiliki pengelolaan keuangan yang baik maka pengelolaan keuangan ini bisa mendukung untuk memperlancar dalam suatu program kegiatan tertentu. Variabel ini diukur dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

4) Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (X3)

Sistem Pengendalian *Intern* pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian *intern* ((PP N0.60 Tahun 2008).

5) Komitmen Organisasi (X4)

Komitmen organisasi ialah keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi, kesediaan untuk berusaha keras demi tercapainya tujuan organisasi dan penerimaan terhadap nilai-niai dan tujuan organisasi. (Luthans, 2002). Variabel ini diukur dengan indikator rasa memiliki, ikatan emosional, arti sebuah organisasi, keterikatan, empati, kejenuhan, semangat, komitmen, loyalitas, tanggungjawab, profesionaldan rasa bersalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner. Dari kuesioner yang diantar sebanyak 100 kuesioner terdapat 93 kuesioner yang kembali dan 7

Kuesioner yang tidak mendapat respon. Dari kuesioner yang diterima tidak semuanya dapat dianalisis karena sebanyak 5 kuesioner yang dikembalikan tidak digunakan karena kuesioner tidak terisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 88 kuesioner.

Uji Realibilitas

Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2014:456).

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbah's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
KAP	0,730	0,6	Reliabel
PKD	0,738	0,6	Reliabel
SPIP	0,756	0,6	Reliabel
KO	0,771	0,6	Reliabel
PGG	0,734	0,6	Reliabel

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan membandingkan *Asymptotic Significance* α = 5%. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan distribusi normal apabila *Asymptotic Significance* >0,05.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		KAPD	PKD	SPIP	KO	PGG
N		88	88	88	88	88
Normal Parameters[a,b]	Mean	42,409	41,352	92,318	51,431	54,511
	Std. D	4,005	4,5106	8,775	6,395	5,293
Most Extreme Differences	Absolute	,093	,096	,079	,127	,122
	Positive	,080	,059	,075	,090	,073
	Negative	-,093	-,096	-,079	-,127	-,122
Kolmogorov-Smirnov Z		,877	,904	,742	1,194	1,145
Asymp. Sig. (2-tailed)		,426	,387	,641	,115	,145

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Imam Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai*tolerance.* Jika VIF < 10 dan nilai *tolerance*< 1 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independen dengan independen lainnya dalam persamaan regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kinerja aparatur pemerintah daerah	,170	5,889
Pengelolaan Keuangan Daerah	,181	5,555
Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah	,625	1,601
Komitmen Organisasi	,602	1,661

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel <10 dan Tolerance >0,10 hal ini dapat

disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Plot. Adapun hasil pengujian heterokedastisitas penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas

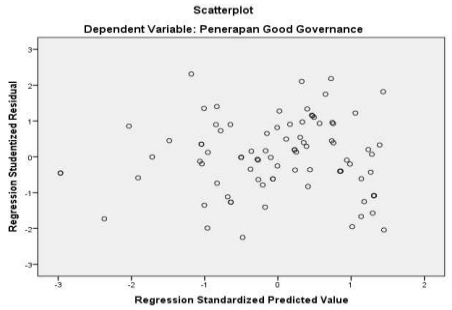

Sumber: *Data Olahan, 2016,*

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi akan menggambarkan apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dengan terikat, namun variabel tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak dipengaruhi oleh data periode sebelumnya (time series).

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,936	,879	,870	1,90999	1,337

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan hasil di atas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara -2 dan +2, yakni sebesar 1,337. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukannya autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5berikut ini:

Tabel 5
Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,416	2,471		,978	,331
	Kinerja aparatur pemerintah daerah	,687	,125	,519	5,533	,000
	Pengelolaan keuangan daerah	,472	,107	,402	4,416	,000
	Sistem, pengendalian *intern* pemerintah	,039	,030	,065	1,995	,012
	Komitmen organisasi	,003	,041	,003	2,065	,002

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Winer Jihad.2008. *Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Pengertian, Sejarah, dan Aplikasinya Pada Instansi Pemerintah Studi Kasus: Direktorat Pembinaan SMK*. Karya Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Fadilah, Sri.2011. *Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance*. Jurnal SNA ke 14 Banda Aceh

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Habibie. 2013. *Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Solok).* Skripsi. UNP. Padang.

Luthans, F.1998. *Organisasi Behaviour, Eight Edition.* New York: Mc Graw Hill

Mahsun, mohammad Dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Tiga.* Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: YKPN

Pemerintah Republik Indonesia. 2008.*Peraturan Pemerintah no 60tahun 2008* tentang sistempengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan. No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ristanti, Ni Made Asih. dkk. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Pnerapan *Good Governance* (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Jurnal*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja

Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks

Robbins, Stephen P.dan Timothy A. Judge.2008. *Perilaku*

Organisasi Edisi Ke-12. Jakarta: Salemba Empat.

Ruspina, Depi Oktia. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian InternalPemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang).* Skripsi. UNP. Padang

Sari, Diana. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.* Simposium Nasional Akuntansi XVI. Palembang

Sedarmayanti. 2012. *Good Governnce (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju

Sekaran, Uma. 2006. *MetodologiPenelitian untuk Bisnis*. Jakarta:Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business*. Edisi Empat. Salemba Empat: Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Sujardi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.* Bandung, PT Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang.Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah, (Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Wiratno, Adi.2010. *Pengaruh Budaya Organisasi,Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance serta Implikasinya Pada Kinerja.* Jurnal Universitas Jendral Soedirman.

Yuliana, 2015. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Good Governance.* Skripsi.Universitas Riau

Evaluasi AKIP Siaran Pers. http://www.menpan.go.id/ http://pekanbaru.bpk.go.id/